

KESIAPAN PELAKU EKONOMI MENGHADAPI KENORMALAN BARU

19

Iwan Hermawan

Abstrak

New normal (kenormalan baru) menegaskan perubahan perilaku baru akibat ketidakpastian. Opini pro dan kontra muncul terkait ketepatan waktu tatanan baru diimplementasikan. Hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19 bukan pilihan buruk, tapi menyisakan tanda tanya besar bagi pelaku ekonomi. Kajian ini bertujuan menganalisis kesiapan pelaku ekonomi menghadapi kenormalan baru. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawabnya dengan didukung data dan informasi yang bersumber dari literatur dan portal berita. Temuan kajian menunjukkan bahwa kenormalan baru belum tepat dilakukan sekarang, namun konsumen dan produsen menunjukkan kesiapannya. Bagi konsumen, hal ini tampak dari perubahan perilaku sehingga memengaruhi pendapatan dan realokasi pengeluaran. Sedangkan kesiapan produsen diwujudkan melalui realokasi sumber daya, walaupun responsitas penawaran tidak setinggi permintaan. Tahapan pemulihan ekonomi sebagai bagian dari bentuk kenormalan baru membutuhkan tingkat kedisiplinan tinggi saat menerapkan protokol kesehatan. Terkait hal itu, Komisi IX dan XI berperan fundamental untuk (a) mengawasi tahapan pemulihan ekonomi dan (b) merealokasi dan refocusing anggaran penanganan pandemi Covid-19.

Pendahuluan

Khitah kenormalan baru sejatinya adalah kenormalan baru pada sektor ekonomi (El-Erian, 2010: 12) dan itu merujuk ke tahap pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah. Konvergensinya dengan *pagebluk* didorong saat perekonomian harus kembali bergeliat namun penularan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* masih terjadi dan vaksinnnya juga belum ditemukan. Jalan tengah ini diharapkan mendorong aktivitas yang produktif namun tetap aman.

Kenormalan baru rentan gagal sehingga akan meningkatkan kasus dan kerugian lebih masif. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan ahli epidemiologi kurang setuju itu dilakukan sekarang karena berkaca dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti disiplin rendah (suarakarya.id., 30 Mei 2020), jumlah tes Covid-19 sedikit, dan *reproduction number (R0)* tinggi (kompas.com., 30 Mei 2020). Di sisi lain, pemerintah dan pelaku usaha lebih optimis karena melihat



krisis kesehatan berpotensi menjadi krisis ekonomi hingga sosial. Rata-rata daya tahan produsen hanya 3 bulan dan isolasi mandiri konsumen memberi tekanan mental (tirto.id., 17 April 2020).

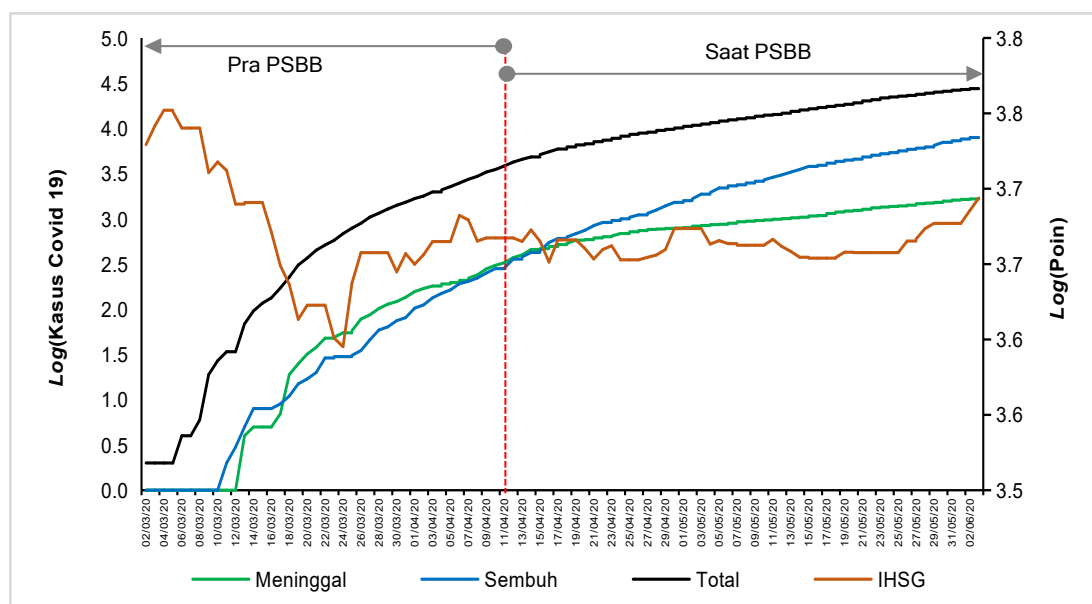
Berbagai bantuan dan stimulus diberikan untuk menjaga daya beli konsumen dan daya produksi produsen yang terganggu (detik.com., 13 Mei 2020). Gangguan ini direfleksikan di kuartal I tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi hanya 2,97 persen (thejakartapost.com., 29 Mei 2020). Kesiapan para pelaku ekonomi akan menjadi bagian penting kesuksesan kenormalan baru. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan menganalisis kesiapan pelaku ekonomi dalam menghadapi kenormalan baru.

Waktu yang Tepat Melaksanakan Kenormalan Baru

Waktu yang tepat memulai kenormalan baru berangkat dari perspektif kesehatan karena pandemi menyangkut hidup

manusia. Meskipun tingkat mortalitas Covid-19 lebih rendah dari *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) namun daya penyebarannya tinggi (Susilo et al., 2020: 63). Jadi para ahli epidemiologi mengatakan tidak tepat kenormalan baru dilakukan pada waktu dekat karena pertambahan kasus belum turun, masalah keabsahan data, dan banyak penduduk belum melakukan tes (tribunnews.com., 30 Mei 2020)

Gambar 1 menunjukkan perkembangan kasus Covid-19 dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penambahan total kasus per hari belum menunjukkan penurunan, apalagi mencapai puncaknya. Penerapan PSBB efektif meningkatkan kasus sembuh dibandingkan meninggal. Lalu, IHSG sebagai salah satu indikator ekonomi, pergerakannya cenderung *rebound*. Gejala ini sejalan prediksi Bank Indonesia, di mana titik balik ekonomi terjadi di kuartal II (tempo.co., 5 Maret 2020).



Sumber: OJK, Bloomberg, dan Kementerian Kesehatan (diolah).

Gambar 1. Perkembangan Kasus Covid-19 dan Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia, Periode 02 Maret 2020 hingga 02 Juni 2020

Berdasarkan penyandingan indikator kesehatan dan ekonomi tersebut, pemberlakuan kenormalan baru belum tepat dilakukan saat ini walaupun ekonomi sedang memiliki momentumnya.

Kesiapan Konsumen

Kesiapan konsumen diwujudkan melalui keputusannya memaksimalkan utilitas dengan batasan pendapatan. Perilaku konsumen dipengaruhi berbagai variabel, termasuk pandemi (OECD, 2020: 1). Kenormalan baru memunculkan kebiasaan, seperti *social/physical distancing*, cuci tangan, dan penggunaan masker, akibat kekhawatirannya terhadap kesehatan (BPS, 2020: 8).

Pembatasan aktivitas dan kondisi ketenagakerjaan menurunkan pendapatan. Selain kelompok miskin dan yang bekerja di sektor informal menjadi paling terdampak, kelompok berpendapatan tinggi pun mengalaminya (BPS, 2020: 16). Hal ini menurunkan daya beli sehingga menstimulasi penurunan konsumsi dan/atau perubahan alokasi pengeluaran. Resultannya tampak dari inflasi bulan April yang hanya 0,08 persen (katadata.co.id., 4 Juni 2020). Alokasi pengeluaran berubah dengan memprioritaskan pada bahan pokok, kesehatan, dan pulsa/paket data dibandingkan lainnya (BPS, 2020: 21).

Kesiapan konsumen juga ditunjukkan melalui keputusannya menabung dengan jumlah lebih banyak dari biasanya (bisnis.com., 14 Mei 2020). Kondisi ini sejalan dengan teori ekonomi, di mana individu memutuskan konsumsi dan tabungannya berdasarkan pertimbangan masa sekarang dan nanti.

Kesiapan Produsen

Kesiapan produsen direpresentasikan dengan keputusannya mencapai profit maksimum dengan batasan biaya produksi. Perilaku produsen juga dipengaruhi oleh pandemi melalui peningkatan biaya karena kekurangan tenaga kerja, rantai pasokan terganggu, dan penurunan kapasitas produksi (bisnis.com., 3 Juni 2020). Berbagai upaya dilakukan, termasuk rasionalisasi tenaga kerja guna memotong biaya tetap, diversifikasi produk dengan merespons permintaan baru berupa masker dan *hand sanitizer*, hingga migrasi ke sistem digital. Namun tidak semua dapat dilakukan *work from home* (WFH) dan digital, hanya yang berpendidikan tinggi yang memiliki fleksibilitas menerapkannya (BPS, 2020: 11). Menurut Kamar Dagang Indonesia (Kadin), tidak heran PHK mencapai 15 juta jiwa (cnnindonesia.com., 1 Mei 2020).

Pandemi memengaruhi produksi yang berujung pada berhentinya usaha, penutupan usaha, atau justru meningkatkan usaha. Sektor yang berkembang, antara lain (a) logistik, (b) alat kesehatan dan obat, (c) pangan, dan (d) telekomunikasi. Sektor tersebut ditopang tren peningkatan permintaan. Sedangkan sektor yang tertekan, antara lain (a) pariwisata, (b) transportasi, (c) tambang, dan (d) otomotif, yang banyak disebabkan penurunan daya beli, PSBB, dan penurunan harga komoditas. Usaha berskala kecil lebih rentan dibandingkan berskala besar dari dampak pandemi (bisnis.com., 3 Juni 2020).

Strategi pada Kenormalan Baru

Strategi pemerintah menghadapi pandemi Covid-19 terbagi dalam tiga prioritas utama, yaitu kesehatan,

sosial, dan ekonomi. Saat ini, pemerintah menjalankan tahapan (pemulihan) ekonomi seiring dengan kenormalan baru yang terbagi 5 tahap, mulai tahap I (01 Juni 2020) hingga tahap V (20 & 27 Juni 2020). Tahapan tersebut memiliki syarat kesehatan ketat sesuai ketentuan *World Health Organization* (WHO). Di sisi lain, saat pemulihan ekonomi dijalankan, besarnya bantuan sosial akan dikurangi walaupun masanya diperpanjang. Begitu pula dengan penerapan kenormalan baru pada level regional, di mana 102 kabupaten/kota yang masuk zona hijau dapat menerapkannya dengan dasar indikator kesehatan tertentu.

Selain menjaga daya beli konsumen, pemerintah juga menjaga agar produsen tetap memproduksi melalui stimulus, baik berupa keringanan pajak dan bea masuk, restitusi, maupun penundaan pembayaran pokok dan bunga kredit usaha rakyat (KUR) (investor.id., 1 April 2020). Masih banyak stimulus lain yang berpotensi digunakan, termasuk penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif air. Namun, itu memerlukan kajian karena bantuan tidak hanya untuk kepentingan produsen dan konsumen tetapi juga keuangan negara.

Stimulus ekonomi berperan penting karena responsitas penawaran relatif lebih lambat dibandingkan permintaan. Preferensi konsumen berubah dengan cepat, namun kapasitas produksi terpasang memerlukan waktu penyesuaian. Oleh sebab itu, stimulus dapat menjadi *bantalan* melewati masa pandemi. Di sisi lain, bantuan juga mengkompensasi penerapan protokol kesehatan di tempat kerja

yang notabene meningkatkan biaya, misalnya penyediaan *hand sanitizer*, ruangan kerja diperluas, penyediaan bis jemputan, dan lain-lain.

Penutup

Meskipun penerapan kenormalan baru belum tepat dilakukan dalam waktu dekat, pelaku ekonomi pasti akan menghadapinya. Tingkat kesiapan konsumen dan produsen menghadapi kenormalan baru dipengaruhi oleh daya adaptasi dan intervensi pemerintah. Kesiapan konsumen terbentuk melalui perubahan perilaku sehingga memengaruhi pendapatan dan alokasi pengeluaran terhadap kebutuhan saat ini dan nanti. Daya beli yang menurun akibat pandemi memerlukan daya ungkit dari bantuan sosial. Bagi produsen, kenormalan baru mendorong realokasi sumber daya guna meraih daya saing. Namun realokasi itu juga berimplikasi meningkatkan PHK, memberhentikan atau menutup usaha yang perlu disiasati pemerintah dengan stimulus ekonomi.

Strategi pemerintah pada kenormalan baru akan tergantung pada (1) tingkat kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan, dan (2) konsistensi penerapan indikator kesehatan dalam menentukan daerah yang diizinkan melakukan kenormalan baru. Poin pertama, diperlukan pengawasan dan sistem *reward-punishment*. Sedangkan poin kedua, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 harus bekerja sama dengan akademisi dan swasta menyediakan layanan pengujian indikator kesehatan secara obyektif.

Terkait pelaksanaan kenormalan baru, Komisi IX dan XI DPR RI berperan fundamental untuk (a) mengawasi seluruh tahapan

pemulihan ekonomi sehingga, baik konsumen maupun produsen, dapat beraktivitas secara aman dan produktif, serta (b) merealokasi dan *refocusing* anggaran dalam APBN tahun 2020 untuk menangani pandemi dan pascapandemi.

Referensi

- BPS. 2020. *Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- “Bukan 2 Juta, Kadin Sebut Korban PHK Akibat Corona 15 Juta”, 1 Mei 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501181726-92-499298/bukan-2-juta-kadin-sebut-korban-phk-akibat-corona-15-juta>, diakses 4 Juni 2020.
- “Dampak Corona, BI Prediksi Ekonomi Rebound di Semester Kedua”, 5 Maret 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1315731/dampak-corona-bi-prediksi-ekonomi-rebound-di-semester-kedua/full&view=ok>, diakses 4 Juni 2020.
- “Daya Beli Masyarakat Rendah Akibat Corona, Inflasi April hanya 0,08%”, 4 Juni 2020, <https://katadata.co.id/berita/2020/05/04/daya-beli-masyarakat-rendah-akibat-corona-inflasi-april-hanya-008>, diakses 4 Juni 2020.
- “Disiplin Masyarakat yang Rendah Potensi Penerapan New Normal Gagal”, 30 Mei 2020, <https://www.suarakarya.id/detail/112000/Disiplin-Masyarakat-Yang-Rendah-Potensi-Penerapan-New-Normal-Gagal>, diakses 2 Juni 2020.
- El-Erian, M.A. 2010. *Navigating the New Normal in Industrial Countries*. Washington DC.: Per Jacobsson Foundation.

- “Epidemiolog: Tes Covid-19 Masih Rendah, Jangan Dulu Berpikir New Normal”, 30 Mei 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/30/201000065/epidemiolog--tes-covid-19-masih-rendah-jangan-dulu-berpikir-new-normal?page=1>, diakses 5 Juni 2020.
- “Inilah Daftar Semua Bantuan Pemerintah untuk Orang Miskin hingga Pengusaha Kaya”, 1 April 2020, <https://investor.id/business/inilah-daftar-semua-bantuan-pemerintah-untuk-orang-miskin-hingga-pengusaha-kaya>, diakses 4 Juni 2020.
- “Jokowi Akui Daya Beli Masyarakat Menurun”, 13 Mei 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5012850/jokowi-akui-daya-beli-masyarakat-menurun>, diakses 4 Juni 2020.
- “Mereka yang Untung dan Buntung Tatkala Pandemi Covid-19”, 17 April 2020, <https://tirto.id/mereka-yang-untung-dan-buntung-tatkala-pandemi-covid-19-eL5l>, diakses 4 Juni 2020.
- “‘New Normal’ Aims to Keep Economy Running: Minister”, 29 Mei 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/29/new-normal-aims-to-keep-economy-running-minister.html>, diakses 2 Juni 2020.
- OECD. 2020. “Evaluating the Initial Impact of Covid-19 Containment Measures on Economic Activity”. Paper, Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.
- “Pakar Epidemiologi UI Ungkap Waktu yang Tepat untuk Memulai New Normal: Tunggu Dulu”, 30 Mei 2020, <https://wow.tribunnews.com/2020/05/30/pakar-epidemiologi-ui-ungkap-waktu-yang-tepat-untuk-memulai-new-normal-tunggu-dulu?page=all>, diakses 4 Juni 2020.

“Pandemi Virus Corona Bikin Masyarakat Rajin Menabung”, 14 Mei 2020, <https://lifestyle.bisnis.com/read/20200514/220/1240904/pandemi-virus-corona-bikin-masyarakat-rajin-menabung>, diakses 4 Juni 2020.

“Survei ILO Beberkan Dampak Covid-19 bagi UMKM”, 3 Juni 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200603/12/1248242/survei-ilo-beberkan-dampak-covid-19-bagi-umkm>, diakses 4 Juni 2020.

Susilo, A., Rumende, C.M., Pitoyo, C.W., Santoso, W.D., Yulianti, M., Herikurniawan, Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E.J., Chen, L.K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C.O.M., & Yuniastuti, E. 2020. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45-67.



Iwan Hermawan
iwan.hermawan@dpr.go.id

Dr. Iwan Hermawan, SP., MSi. menyelesaikan pendidikan program doktoral Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2020. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda di Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI dengan fokus pada isu-isu ekonomi makro, ekonomi internasional, dan ekonomi pertanian. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal terakreditasi, prosiding, dan buku, antara lain “Daya Saing Rempah Indonesia di Pasar ASEAN Periode Pra dan Pasca Krisis Ekonomi Global” (Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 2015); “Indonesian Readiness for Digital Economy: Case on Trade Flows in ASEAN Region” (ICOT 2019); “Measuring ASEAN Rice Non-Tariff Measures (NTMs) and Its Impact on Indonesian Food (Rice) Security” (ICAME, 2018); dan “The Impact of ASEAN Economy Community on Indonesian Food Security: Rice Case” (bagian buku dari *Challenges of the Global Economy: Some Indonesian Issues*, 2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.